

MEMBANGUN INOVATOR MUDA DI ERA SOCIETY 5.0: LITERASI DIGITAL DAN KECERDASAN EMOSIONAL GEN Z DALAM MENYIKAPI HOAKS POLITIK

B. Trisna Gunawan¹, Marcella Rachel Manupassa², Putu Ayu Astini³
Fakultas Bahasa Asing, Universitas Mahasaraswati Denpasar, Bali, Indonesia

*Corresponding author: bernadinustrisnag8@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran literasi digital dan kecerdasan emosional mahasiswa dalam mengidentifikasi serta merespon konten politik yang bersifat hoaks di platform TikTok. Responden penelitian adalah mahasiswa Fakultas Bahasa Asing semester 1 aktif dan masuk dalam kategori Gen Z yang diminta menonton sepuluh video pendek bertema politik, kemudian memberikan penilaian apakah video tersebut tergolong fakta atau hoaks disertai alasan yang mendasarinya. Data yang diperoleh dianalisis untuk melihat sejauh mana kemampuan literasi digital mahasiswa dalam memilah informasi serta bagaimana kecerdasan emosional berperan dalam mengendalikan respon terhadap provokasi atau manipulasi informasi politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi digital yang baik memudahkan mahasiswa dalam mengenali ciri-ciri hoaks, sementara kecerdasan emosional berkontribusi pada kemampuan menjaga objektivitas dan menghindari bias emosional dalam pengambilan keputusan. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan literasi digital dan kecerdasan emosional sebagai fondasi pembentukan inovator muda yang kritis, adaptif, dan berintegritas di era Society 5.0.

Kata kunci: gen Z, hoaks, inovator muda, kecerdasan emosional, literasi digital

Pendahuluan

Era Society 5.0 ditandai dengan derasnya arus informasi digital yang menyatu dengan kehidupan sehari-hari. Salah satu tantangan besar yang dihadapi generasi muda adalah maraknya hoaks politik yang beredar di media sosial, khususnya TikTok. Hoaks tidak hanya mengganggu kualitas demokrasi, tetapi juga dapat mempengaruhi pola pikir dan sikap kritis mahasiswa sebagai calon inovator muda (Ramadinta & Salma, 2025; Radison & Adnan, 2024). Oleh karena itu, literasi digital dan kecerdasan emosional menjadi dua kompetensi penting yang harus dimiliki mahasiswa agar mampu memilah informasi secara objektif, kritis, dan bijak (Fauzi & Marhamah, 2021; Lestari et al., 2025).

Beberapa penelitian telah menjawab isu ini yakni penelitian Adnan & Radison (2024) menunjukkan bahwa hoaks politik yang beredar di TikTok berpengaruh signifikan terhadap persepsi mahasiswa, khususnya dalam konteks pemilihan presiden. Temuan ini menegaskan bahwa mahasiswa sebagai bagian dari generasi muda rentan terpengaruh oleh informasi yang tidak valid, sehingga literasi digital menjadi kompetensi penting untuk menjaga objektivitas dalam menyikapi isu politik. Fauzi & Marhamah (2021) juga menekankan bahwa literasi digital berperan besar dalam mencegah penyebaran hoaks di kalangan remaja. Penelitian mereka menunjukkan bahwa semakin tinggi kemampuan literasi digital, semakin besar pula kemampuan individu untuk mengenali dan menolak informasi palsu. Hal ini diperkuat oleh Lestari et al. (2025) yang menemukan bahwa literasi digital merupakan strategi utama dalam mengurangi penyebaran hoaks di masyarakat, terutama melalui media sosial. Ramadinta & Salma (2025) juga menambahkan bahwa literasi digital berpengaruh terhadap perilaku Gen Z dalam menyebarkan berita hoaks di TikTok, sehingga penguatan literasi digital menjadi kebutuhan mendesak.

Selain literasi digital, kecerdasan emosional juga berperan penting dalam menentukan bagaimana individu merespon informasi. Husnah (2024) menemukan bahwa kecerdasan emosional, bersama dengan efikasi diri dan literasi digital, berpengaruh terhadap prestasi belajar mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa kecerdasan emosional membantu mahasiswa mengendalikan emosi dan menjaga fokus dalam menghadapi arus informasi. Penelitian Febriana (2024) juga mendukung temuan tersebut, dengan menunjukkan bahwa kecerdasan emosional berkontribusi terhadap motivasi belajar siswa, yang secara tidak langsung mempengaruhi cara mereka menyikapi informasi digital. Selain itu, Potenciando et al. (2024) memperluas perspektif dengan meneliti hubungan antara kecerdasan emosional dan kemampuan mahasiswa dalam mengenali berita palsu. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa mahasiswa dengan kecerdasan emosional tinggi lebih mampu membedakan fakta dari hoaks, karena mereka tidak mudah terprovokasi oleh konten yang bersifat manipulatif.

Secara keseluruhan, literatur yang ada menegaskan bahwa literasi digital dan kecerdasan emosional merupakan dua aspek yang saling melengkapi. Literasi digital membantu mahasiswa mengenali ciri-ciri hoaks, sementara kecerdasan emosional menjaga agar respon terhadap informasi tetap rasional dan tidak bias. Kombinasi keduanya menjadi landasan penting dalam membentuk inovator muda yang kritis, adaptif, dan berintegritas di era Society 5.0.

Dalam penelitian ini, masalah yang dianalisis adalah bagaimana kemampuan literasi digital generasi muda utamanya generasi Z merespon konten-konten sarat hoaks, apakah mereka bisa menilai konten-konten tersebut merupakan hoaks atau fakta. Selain itu, alasan mengenai respon terhadap konten tersebut juga dibahas dalam analisis penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana generasi Z ini mengenali konten hoaks dan pendapat mereka tentang konten itu.

Generasi Z sendiri disebut sebagai generasi yang paling adaptif dan aktif menjadi pengguna media sosial. Untuk itulah responden dari penelitian ini adalah para mahasiswa semester 1 Fakultas Bahasa Asing Universitas Mahasaraswati Denpasar sekaligus sebagai sampling dari kategori generasi Z. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen di mana mahasiswa menonton video faktual dan video hoaks yang bertema politik. Video politik dipilih sebagai alat eksperimen dalam penelitian ini karena politik merupakan aspek kehidupan yang tidak dapat dihindari dan banyak sekali konten politik yang disinformasi. Cukup berbahaya jika konten-konten ini salah dimengerti sebab akan menyebabkan bias informasi khususnya bagi generasi muda. Ketika para mahasiswa tersebut kelak menjadi bagian dari masyarakat demokratis, mereka secara tak terelakkan akan memiliki keterlibatan tidak langsung dalam proses perumusan kebijakan melalui proses demokratis dan politisi, dan kebijakan-kebijakan ini akan berdampak pada seluruh aspek kehidupan lainnya.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain eksperimen sederhana untuk mengkaji kemampuan mahasiswa dalam membedakan konten hoaks atau konten disinformasi dan fakta pada platform Tiktok. Responden penelitian adalah mahasiswa aktif semester 1 yang memang termasuk generasi Z yang diminta menonton sepuluh video pendek bertema politik yang telah dikurasi dan terdiri atas konten faktual serta hoaks, kemudian mengklasifikasikan setiap video sebagai fakta atau hoaks serta menuliskan alasan atas penilaian tersebut. Jumlah responden yang terkumpul adalah 37 orang mahasiswa semester 1 Fakultas Bahasa Asing. Data yang dikumpulkan melalui observasi dan dokumentasi jawaban tertulis responden, lalu dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk melihat pola respons mahasiswa dalam menyikapi konten politik. Metode ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menekankan pentingnya literasi digital dalam mengidentifikasi hoaks melalui evaluasi kredibilitas informasi sumber, dan verifikasi dari rujukan yang terpercaya (Febriana, 2024), serta penelitian yang menunjukkan bahwa kecerdasan emosional dapat membantu mengelola emosi dan mengendalikan reaksi terhadap konten politik yang provokatif sehingga objektivitas respons mahasiswa tetap terjaga (Husnah, 2024).

Hasil dan Pembahasan

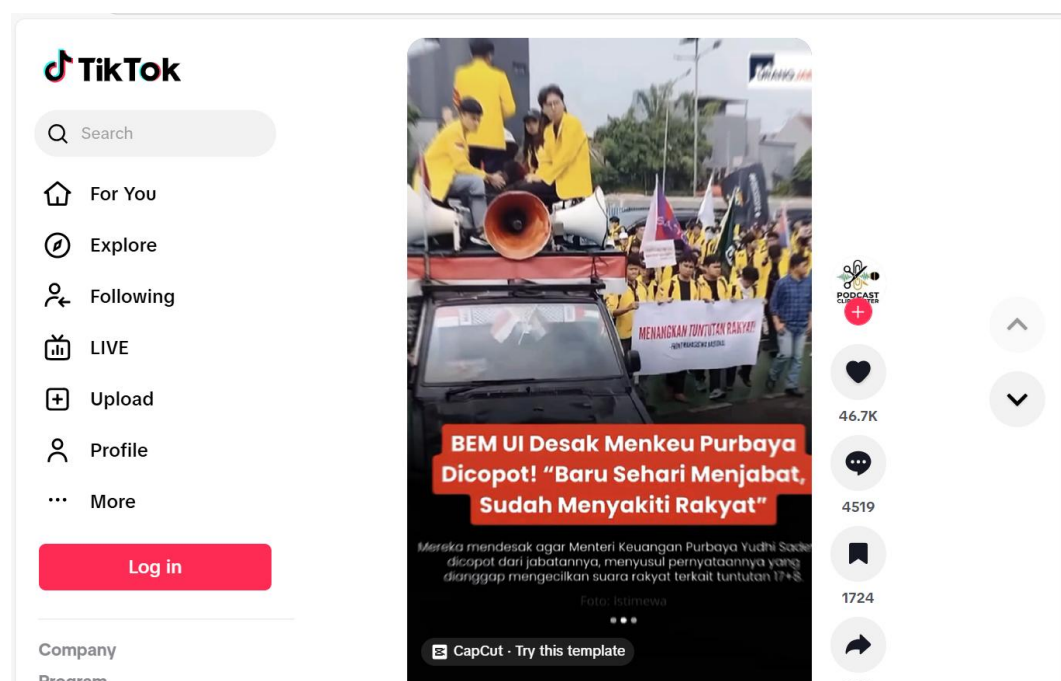
Analisis data menunjukkan variasi kemampuan mahasiswa dalam membedakan hoaks politik. Mahasiswa dengan literasi digital tinggi lebih cepat dan tepat mengidentifikasi informasi palsu (Lestari et al., 2025; Ramadinta & Salma, 2025), sedangkan mahasiswa dengan kecerdasan emosional baik mampu menjaga objektivitas dan tidak mudah terprovokasi oleh konten yang bersifat manipulatif (Potenciando et al., 2024; The Conversation, 2021). Pembahasan menekankan

bahwa kombinasi literasi digital dan kecerdasan emosional berperan penting dalam membentuk sikap kritis, rasional, dan adaptif mahasiswa sebagai calon inovator muda.

Tabel 1. Hasil Responden

Video	Hoaks	Fakta
1	15	10
2	14	18
3	32	3
4	4	30
5	33	3
6	35	1
7	9	27
8	33	3
9	30	5
10	14	20

Video 1



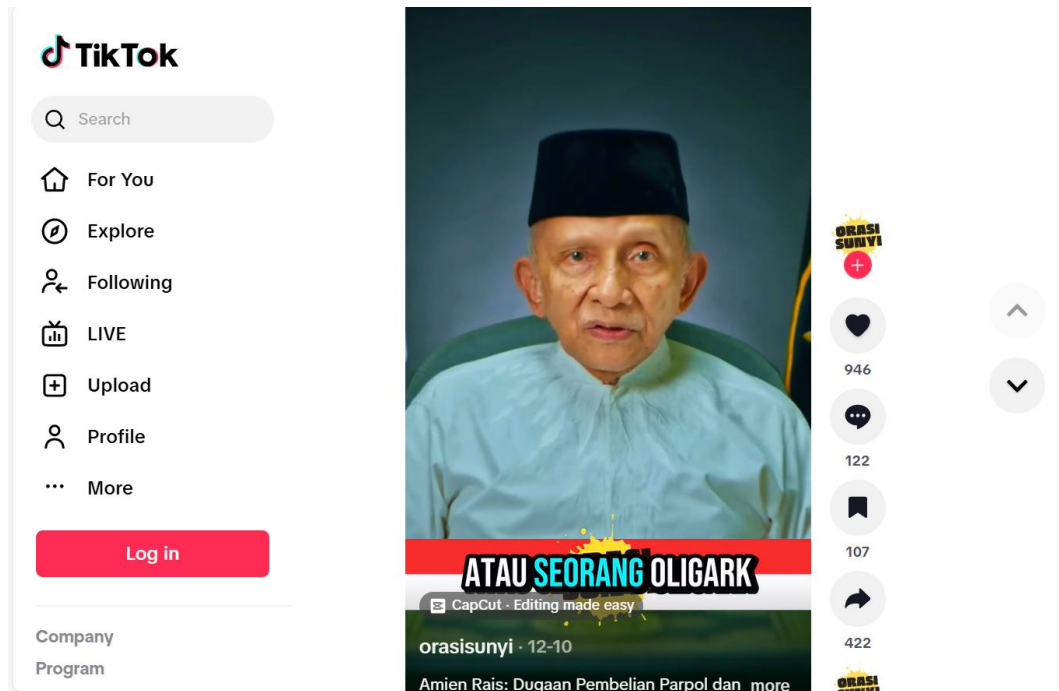
Gambar 1. Narasi Desakan Pencopotan Menteri Keuangan

Pada video pertama, ditampilkan konten berita mengenai tuntutan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) terhadap pencopotan Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan. Distribusi

persepsi responden menunjukkan bahwa 15 orang menilai informasi tersebut sebagai disinformasi (hoaks), sementara 10 orang meyakiniya sebagai fakta, dan 10 lainnya memilih untuk tidak memberikan pernyataan pasti terkait validitas konten tersebut. Analisis lebih lanjut memperlihatkan bahwa video yang beredar mengenai tuntutan pencopotan tersebut merupakan hoaks, sebab menurut klarifikasi resmi, BEM UI tidak pernah melontarkan tuntutan pencopotan Purbaya. Faktanya, aksi yang dilakukan BEM UI memang menyoroti pernyataan kontroversial Purbaya terkait “17+8 Tuntutan Rakyat” yang dianggap merendahkan aspirasi masyarakat, sehingga muncul demonstrasi di depan Gedung DPR RI. Namun, narasi yang menyebutkan adanya tuntutan resmi pencopotan jabatan dari BEM UI dalam bentuk video telah dikonfirmasi sebagai informasi palsu oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta BEM UI sendiri (Kominfo, 2021).

Dalam konteks literasi digital, Generasi Z memiliki peran penting dalam menyikapi konten politik yang beredar di media sosial. Hasil distribusi persepsi menunjukkan adanya keraguan dan perbedaan pandangan di antara responden, yang mencerminkan bahwa kemampuan literasi digital Gen Z masih beragam. Sebagian mampu mengidentifikasi hoaks dengan tepat, sementara sebagian lainnya masih mudah terpengaruh oleh narasi yang melibatkan figur publik atau organisasi mahasiswa. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menegaskan bahwa meskipun Gen Z adalah generasi yang paling akrab dengan teknologi digital, mereka tetap menghadapi tantangan dalam membedakan informasi valid dari misinformasi, terutama dalam isu politik yang sarat kepentingan. Oleh karena itu, penguatan literasi digital melalui pendidikan kritis, pelatihan verifikasi informasi, dan kampanye anti-hoaks menjadi sangat penting agar Gen Z dapat berperan sebagai agen demokrasi yang sehat dan tidak mudah terjebak dalam arus disinformasi.

Video 2



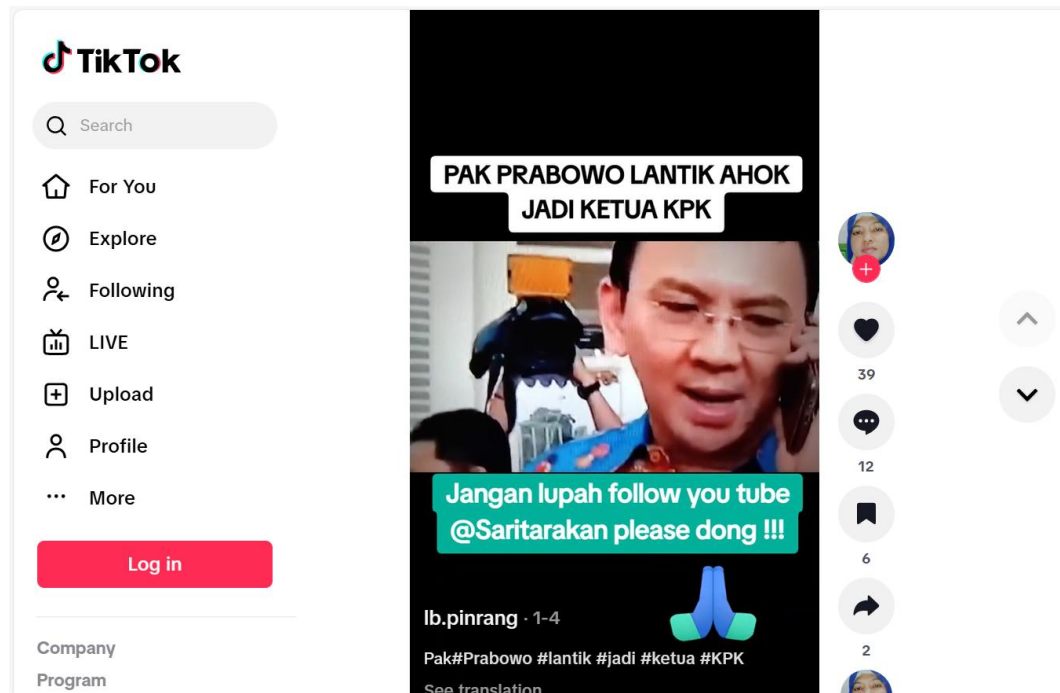
Gambar 2. Isu Biaya Politik dan Oligarki

Video kedua menampilkan pernyataan Amien Rais mengenai besaran dana yang harus dikeluarkan oleh pihak oligarki untuk menguasai sebuah partai politik. Hasil eksperimen menunjukkan kecenderungan responden untuk mempercayai narasi ini, dengan 18 orang menyatakan informasi tersebut sebagai fakta, sementara 14 orang menilainya sebagai hoaks, dan 5 orang memilih bersikap netral. Temuan ini memperlihatkan adanya polarisasi persepsi di kalangan masyarakat terhadap isu oligarki dalam politik Indonesia. Hal ini wajar mengingat Amien Rais, sebagai tokoh reformasi dan Ketua Majelis Syura Partai Ummat, dikenal kerap melontarkan kritik keras terhadap dominasi oligarki dalam pemerintahan maupun partai politik. Namun, berdasarkan fakta yang beredar di internet, pernyataan Amien Rais lebih banyak berupa kritik normatif terhadap oligarki tanpa menyebutkan angka pasti terkait dana yang harus dikeluarkan untuk menguasai partai politik. Dengan demikian, narasi yang beredar dalam video tersebut dapat dikategorikan sebagai distorsi informasi, karena meskipun benar Amien Rais sering mengkritik oligarki, klaim mengenai besaran dana spesifik tidak memiliki dasar bukti yang jelas.

Dalam konteks literasi digital, Generasi Z menjadi kelompok yang paling aktif mengonsumsi dan menyebarkan informasi politik melalui media sosial. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa sebagian besar responden dari kalangan Gen Z cenderung mempercayai narasi dalam video tersebut, yang menandakan bahwa kemampuan literasi digital mereka masih perlu diperkuat. Meski Gen Z terbiasa dengan teknologi dan informasi daring, mereka tetap rentan terhadap misinformasi politik, terutama ketika narasi tersebut melibatkan figur publik yang memiliki

reputasi kuat. Sejumlah penelitian menegaskan bahwa Gen Z sering menjadi aktor utama dalam demokrasi digital, tetapi juga menghadapi tantangan fenomena *post-truth*, di mana opini dan emosi lebih dominan daripada data objektif (Kumparan, 2025; Universitas Airlangga, 2025). Oleh karena itu, penting bagi Gen Z untuk dibekali keterampilan verifikasi informasi, berpikir kritis, dan memahami konteks politik yang lebih luas agar tidak mudah terjebak dalam arus misinformasi.

Video 3

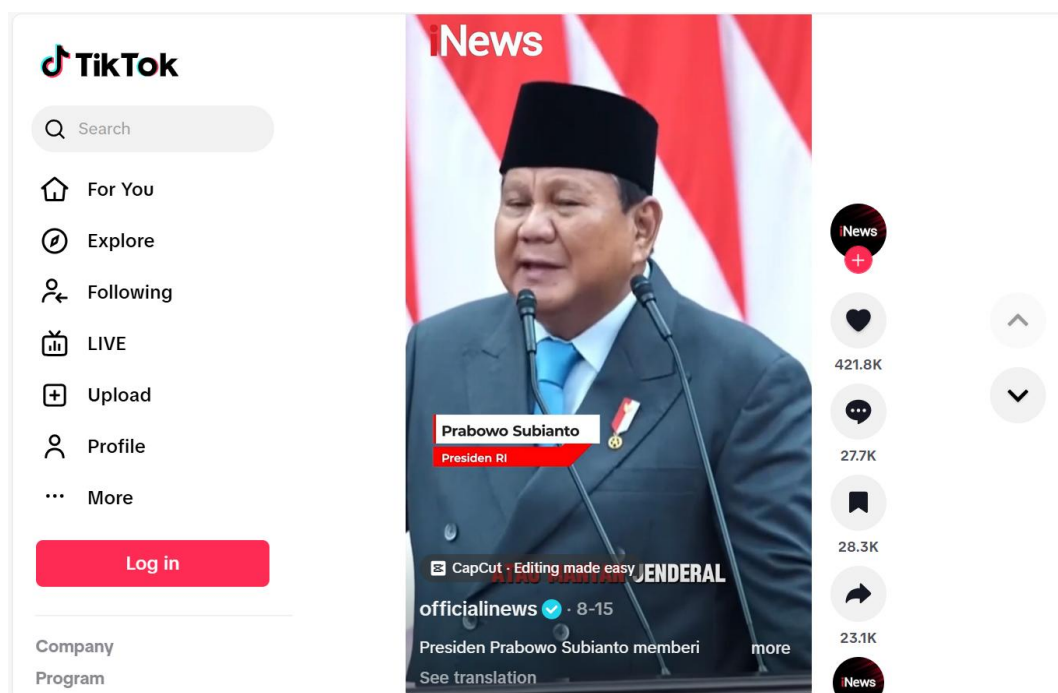


Gambar 3. Klaim Pelantikan Ketua KPK

Video ketiga menyajikan potongan wawancara Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan narasi bahwa dirinya telah dilantik oleh Prabowo Subianto sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Analisis terhadap respon partisipan menunjukkan tingkat identifikasi yang sangat tinggi terhadap disinformasi, di mana 32 responden secara tegas menyatakan konten tersebut sebagai hoaks, hanya 3 responden yang menganggapnya sebagai fakta, dan 2 lainnya tidak memberikan tanggapan. Berdasarkan fakta yang beredar di internet, narasi tersebut jelas merupakan informasi palsu, karena tidak pernah ada pelantikan Basuki Tjahaja Purnama sebagai Ketua KPK oleh Prabowo Subianto. Posisi Ketua KPK ditentukan melalui mekanisme seleksi dan persetujuan DPR, bukan melalui penunjukan langsung oleh Presiden atau pejabat politik tertentu. Klarifikasi dari berbagai media nasional dan lembaga resmi menegaskan bahwa video tersebut adalah bentuk disinformasi yang sengaja diproduksi untuk menyesatkan publik.

Dalam konteks literasi digital, hasil eksperimen menunjukkan bahwa mayoritas responden mampu mengenali konten tersebut sebagai hoaks. Hal ini mencerminkan adanya kemajuan kemampuan literasi digital di kalangan Gen Z, yang semakin terbiasa melakukan verifikasi informasi melalui sumber resmi dan media kredibel. Namun, masih terdapat sebagian kecil responden yang mempercayai narasi tersebut, menunjukkan bahwa kerentanan terhadap misinformasi tetap ada, terutama ketika konten dikemas dengan figur publik yang memiliki popularitas tinggi. Penelitian terbaru menegaskan bahwa meskipun Gen Z adalah generasi yang paling akrab dengan teknologi digital, mereka tetap menghadapi tantangan dalam membedakan informasi valid dari misinformasi politik, sehingga penguatan literasi digital melalui pendidikan kritis, kampanye anti-hoaks, dan pelatihan verifikasi informasi tetap diperlukan (Kumparan, 2025; Universitas Airlangga, 2025). Dengan demikian, kemampuan Gen Z dalam mengidentifikasi hoaks pada video ini menunjukkan potensi besar sebagai agen demokrasi digital, tetapi juga menegaskan perlunya strategi berkelanjutan untuk memperkuat daya kritis mereka terhadap konten politik yang menyesatkan.

Video 4



Gambar 4. Peringatan Presiden Terkait Tambang Ilegal

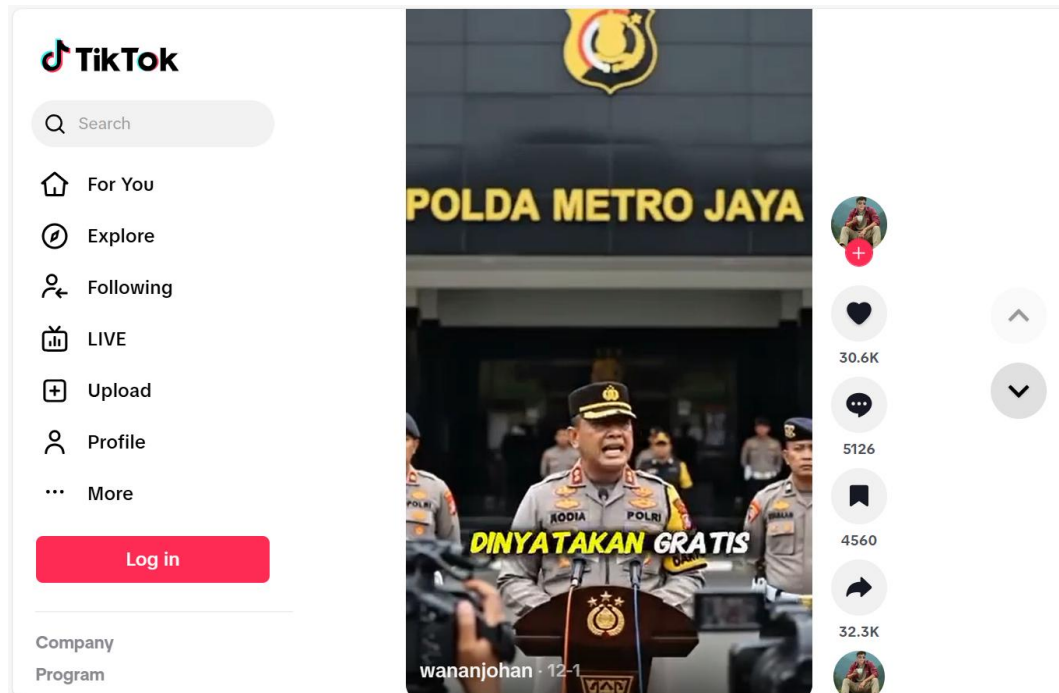
Video keempat memuat cuplikan pidato Presiden Prabowo Subianto yang memberikan instruksi tegas kepada aparat penegak hukum untuk tidak terlibat dalam praktik tambang ilegal. Analisis terhadap respon partisipan menunjukkan bahwa 30 orang mengonfirmasi informasi ini sebagai fakta, sementara 4 responden menganggapnya hoaks, dan 3 orang tidak memberikan kepastian. Berdasarkan fakta

yang beredar di internet, pidato tersebut memang benar adanya. Dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD pada 15 Agustus 2025, Presiden Prabowo menegaskan komitmennya memberantas lebih dari 1.063 tambang ilegal yang merugikan negara hingga Rp300 triliun, serta memperingatkan aparat TNI, Polri, dan pengusaha besar agar tidak terlibat dalam praktik tersebut. Dengan demikian, konten video ini dapat dikategorikan sebagai informasi faktual, bukan hoaks.

Hasil eksperimen menunjukkan bahwa mayoritas responden, yang sebagian besar berasal dari kalangan Gen Z, mampu mengenali kebenaran informasi dalam video ini. Hal ini mencerminkan adanya kemajuan kemampuan literasi digital Gen Z, terutama dalam membedakan konten politik faktual dari hoaks. Gen Z terbiasa mengakses informasi melalui media sosial dan portal berita daring, sehingga mereka lebih cepat melakukan verifikasi terhadap isu-isu aktual. Namun, masih terdapat sebagian kecil responden yang meragukan atau bahkan menganggap video tersebut sebagai hoaks, menandakan bahwa kerentanan terhadap misinformasi tetap ada.

Penelitian terbaru menegaskan bahwa meskipun Gen Z adalah generasi yang paling akrab dengan teknologi digital, mereka tetap menghadapi tantangan dalam era *post-truth*, di mana opini dan emosi sering kali lebih dominan daripada data objektif (Kumparan, 2025; Universitas Airlangga, 2025). Oleh karena itu, penguatan literasi digital melalui pendidikan kritis, kampanye anti-hoaks, dan pelatihan verifikasi informasi tetap diperlukan. Kasus video ini menunjukkan bahwa Gen Z memiliki potensi besar sebagai agen demokrasi digital yang sehat, tetapi tetap membutuhkan strategi berkelanjutan untuk memperkuat daya kritis terhadap konten politik yang beredar.

Video 5



Gambar 5. Sosialisasi Layanan Kepolisian Tanpa Biaya

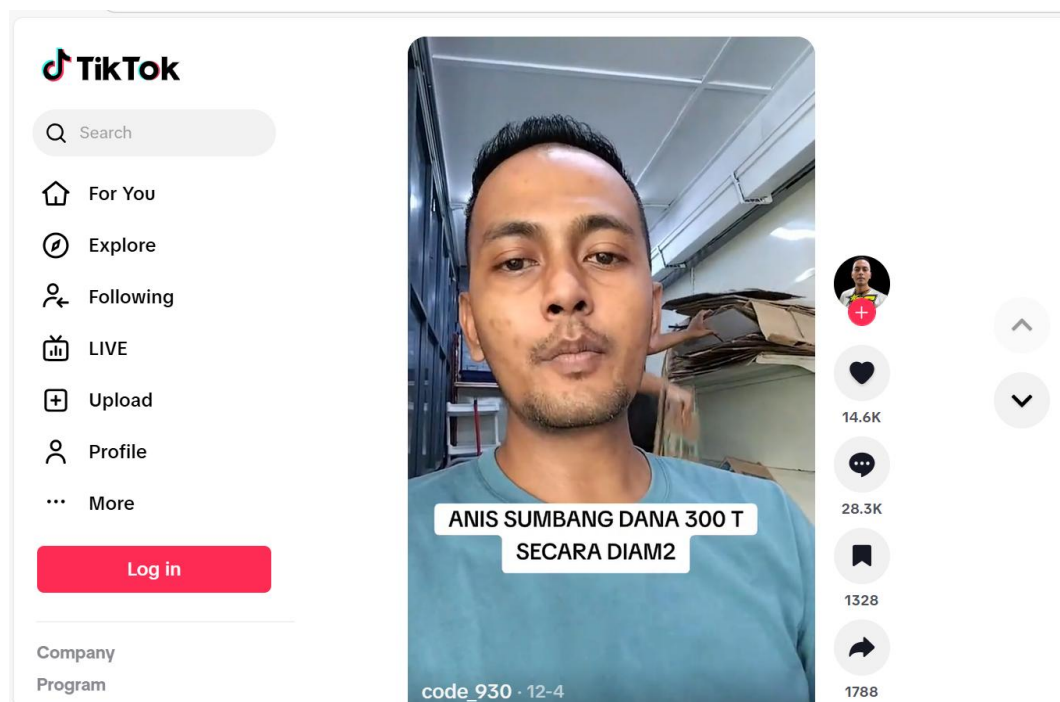
Konten kelima mengeksplorasi persepsi publik terhadap informasi mengenai penghapusan biaya pada layanan kepolisian, seperti pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan pengurusan dokumen kendaraan. Analisis menunjukkan bahwa 33 responden mengidentifikasi narasi ini sebagai hoaks, sementara hanya 3 responden menyatakan fakta, dan 1 orang memberikan respon ragu-ragu. Distribusi ini mengindikasikan adanya tingkat skeptisisme yang cukup tinggi terhadap isu kebijakan birokrasi yang bersifat populis. Berdasarkan fakta yang beredar di internet, informasi mengenai penghapusan biaya layanan kepolisian memang tidak benar. Pembuatan SIM dan pengurusan dokumen kendaraan tetap dikenakan biaya resmi sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bersama Polri telah beberapa kali menegaskan bahwa kabar penghapusan biaya layanan kepolisian adalah hoaks yang sering beredar di media sosial untuk menarik perhatian publik.

Dalam konteks literasi digital, hasil eksperimen menunjukkan bahwa mayoritas responden, yang sebagian besar berasal dari kalangan Gen Z, mampu mengenali narasi ini sebagai hoaks. Hal ini mencerminkan adanya kemajuan kemampuan literasi digital Gen Z, terutama dalam menyikapi isu-isu kebijakan birokrasi yang bersifat populis. Gen Z terbiasa mengakses informasi melalui media sosial dan portal berita daring, sehingga mereka lebih cepat melakukan verifikasi terhadap isu-isu aktual. Namun, masih terdapat sebagian kecil responden yang mempercayai narasi tersebut, menandakan bahwa kerentanan terhadap

misinformasi tetap ada, terutama ketika konten dikemas dengan gaya populis yang seolah-olah menguntungkan masyarakat.

Penelitian terbaru menegaskan bahwa meskipun Gen Z adalah generasi yang paling akrab dengan teknologi digital, mereka tetap menghadapi tantangan dalam era *post-truth*, di mana opini dan emosi sering kali lebih dominan daripada data objektif (Kumparan, 2025; Universitas Airlangga, 2025). Oleh karena itu, penguatan literasi digital melalui pendidikan kritis, kampanye anti-hoaks, dan pelatihan verifikasi informasi tetap diperlukan. Kasus konten kelima ini menunjukkan bahwa Gen Z memiliki potensi besar sebagai agen demokrasi digital yang sehat, tetapi tetap membutuhkan strategi berkelanjutan untuk memperkuat daya kritis terhadap konten birokrasi yang menyesatkan.

Video 6



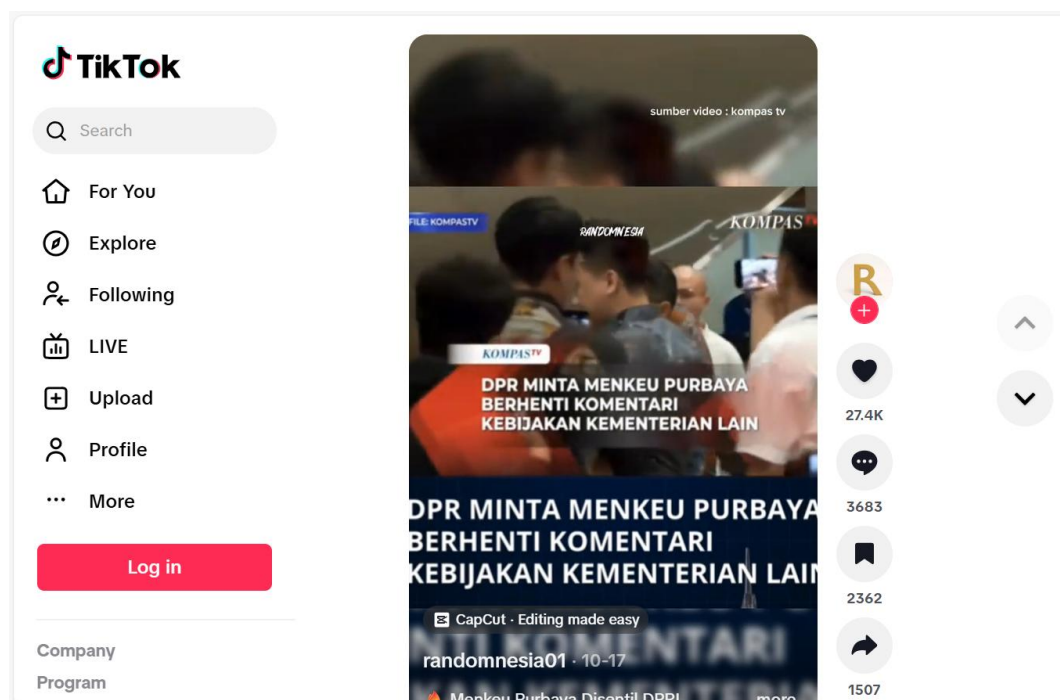
Gambar 6. Narasi Donasi Dana dalam Jumlah Besar

Video keenam memuat klaim mengenai pemberian dana sebesar 300 Triliun oleh Anies Baswedan kepada korban bencana secara tertutup. Temuan penelitian menunjukkan konsensus yang kuat di kalangan responden untuk melabeli informasi ini sebagai hoaks (35 orang). Hanya masing-masing 1 responden yang memberikan jawaban fakta dan netral, yang mengonfirmasi bahwa narasi dengan klaim data yang tidak rasional cenderung lebih mudah dideteksi sebagai ketidakbenaran. Menurut informasi dari Saber Hoaks Jawa Barat, tidak ditemukan bukti atau

laporan resmi yang mendukung klaim ini. Video dan thumbnail yang menuliskan klaim sumbangan Rp300 triliun itu merupakan gabungan visual yang tidak berhubungan dan tidak mencerminkan fakta nyata.

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat indikasi kemampuan literasi digital di kalangan Gen Z: informasi dengan angka yang sangat besar dan tidak realistis seperti *“Rp300 triliun sumbangan diam-diam”* cenderung mudah dikenali sebagai tidak benar oleh responden muda, menunjukkan bahwa mereka lebih kritis terhadap klaim yang tidak konsisten dengan berita kredibel dan logika umum. Hal ini konsisten dengan observasi literasi digital di mana konten yang terlalu sensasional atau irasional mudah dipertanyakan oleh generasi yang terbiasa memverifikasi sumber informasi. Gen Z yang menunjukkan kemampuan menandai klaim hoaks kemungkinan besar melakukan pemeriksaan silang dengan sumber berita resmi, logika angka yang realistis, serta pengetahuan umum tentang birokrasi anggaran negara, keterampilan yang menjadi bagian penting dari literasi digital kritis di era informasi saat ini.

Video 7



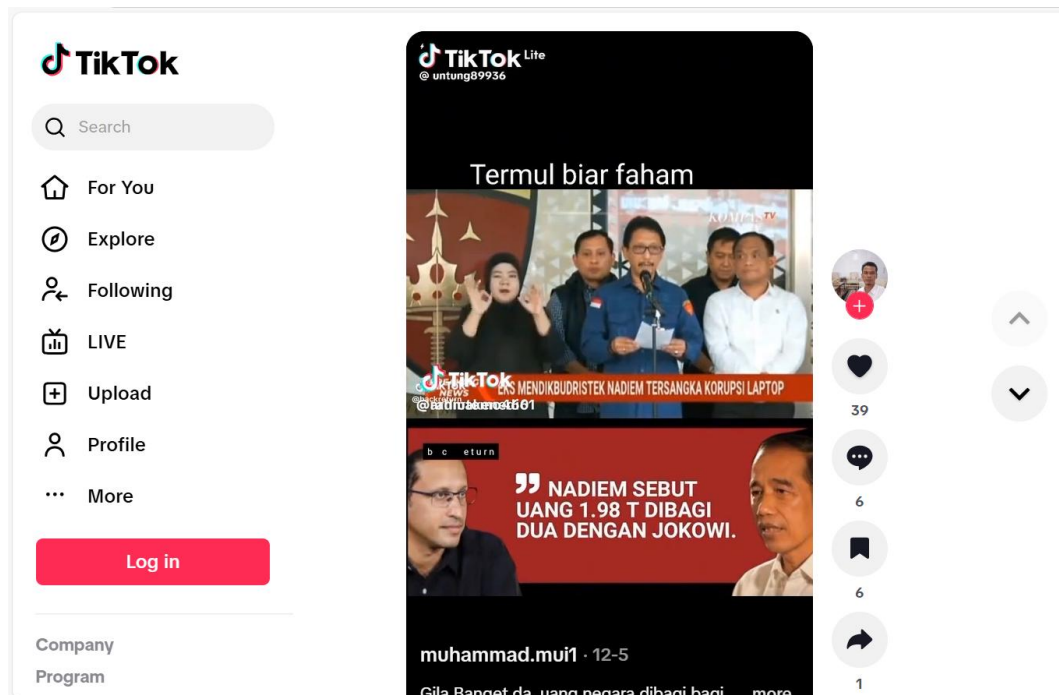
Gambar 7. Dinamika Komunikasi Politik DPR dan Menkeu

Pada video ketujuh, ditampilkan interaksi antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan anggota legislatif mengenai batasan komentar antar kementerian. Pola jawaban menunjukkan bahwa sebagian besar responden (27 orang) menganggap peristiwa tersebut benar-benar terjadi atau bersifat fakta. Sebaliknya, 9 orang menilainya sebagai hoaks dan 1 orang memilih untuk tidak

memberikan tanggapan pasti. Video yang menunjukkan Purbaya Yudhi Sadewa dan anggota legislatif membahas batasan komentar antar kementerian sejalan dengan fakta bahwa Purbaya memang menjadi sorotan DPR terkait gaya komunikasinya, termasuk kritik dari Komisi XI DPR RI yang meminta agar ia tidak terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain dan fokus pada kebijakan fiskal besar. Kritik ini dilaporkan secara resmi oleh ANTARA News. Dalam responnya, Purbaya menyatakan bahwa komentarnya bukan bermaksud mencampuri kerja kementerian lain, melainkan menegaskan tanggung jawabnya untuk memastikan anggaran Kemenkeu terserap efektif.

Berdasarkan pola jawaban responden, temuan ini dapat dikaitkan ke aspek literasi digital. Mayoritas responden yang menganggap peristiwa sebagai fakta menunjukkan bahwa Gen Z cukup mampu mengenali peristiwa yang berlandaskan interaksi nyata antara pejabat negara dan DPR, terutama bila narasi tampak masuk akal dan sesuai pola hubungan eksekutif-legislatif yang umum dibahas di media. Ini mencerminkan kemampuan dasar literasi digital untuk mengidentifikasi konten yang sesuai dengan laporan media mainstream dan konteks nyata pemerintahan. Responden yang memberi jawaban hoaks atau ragu kemungkinan menghadapi kesulitan ketika cuplikan video di luar konteks lebih panjang, atau tidak menunjukkan sumber yang jelas. Gen Z yang kurang familiar dengan konfirmasi silang berita resmi mungkin lebih mudah salah tafsir jika hanya melihat satu klip pendek tanpa konteks. Kemampuan literasi digital Gen Z tampak lebih kuat ketika konten selaras dengan logika atau informasi yang bisa diverifikasi (mis. perdebatan politik yang umum terjadi), namun masih bervariasi ketika konteks tidak lengkap atau narasi bersifat ambigu. Hal ini konsisten dengan studi literasi digital yang menunjukkan bahwa verifikasi sumber, konfirmasi silang, serta pemahaman konteks adalah keterampilan yang perlu terus diasah.

Video 8



Gambar 8. Tuduhan Korupsi di Lingkungan Kemendikbudristek

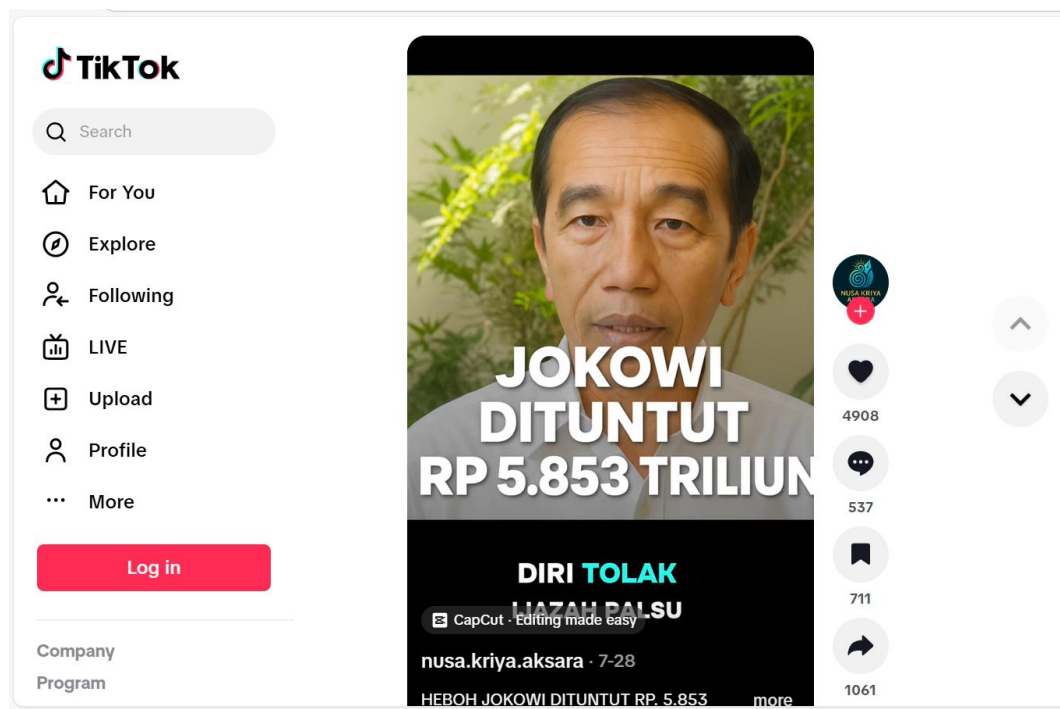
Video kedelapan menyajikan dugaan korupsi dana sebesar 1,98 Triliun yang dikaitkan dengan Nadiem Makarim dan Joko Widodo. Serupa dengan pola reaksi terhadap isu korupsi lainnya, 33 responden berhasil mengidentifikasi konten ini sebagai disinformasi. Frekuensi responden yang mempercayainya sebagai fakta sangat rendah (3 orang), dengan 1 responden yang tidak memberikan pernyataan.

Ada dasar fakta tentang dugaan korupsi yang melibatkan Nadiem Makarim, tetapi dasar fakta ini berbeda dengan narasi yang mengaitkannya langsung dengan Joko Widodo. Faktanya, Nadiem Makarim resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook oleh Kejaksaan Agung, di mana kerugian negara yang disebut mencapai sekitar Rp1,98 triliun. Kasus ini berkaitan dengan proyek pengadaan Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) selama periode 2019–2022, menurut Detik.com. Penetapan tersangka ini memang diumumkan secara resmi oleh Kejaksaan Agung dan bahkan dilakukan penahanan selama 20 hari untuk keperluan pemeriksaan lanjutan. Namun, menurut PPID Diskominfo, klaim bahwa Nadiem “menyerahkan uang hasil pengadaan Rp. 450 triliun atau Rp. 11 triliun kepada Presiden Jokowi atau keluarganya” adalah hoaks/manipulasi konten. Unggahan semacam itu beredar di media sosial dan telah diklarifikasi sebagai hasil edit judul artikel asli yang telah dipalsukan.

Mayoritas responden berhasil mengidentifikasi narasi hoaks yang sangat berlebihan (misalnya angka Rp 450 triliun atau pengaitan langsung dengan Presiden

Jokowi) sebagai disinformasi. Ini menunjukkan bahwa Gen Z cenderung sadar akan tak masuk akal nya angka yang jauh dari konteks atau fakta yang dilaporkan media arus utama, yang merupakan suatu aspek penting dari literasi digital kritis. Namun, sejumlah kecil responden mempercayai klaim itu sebagai fakta. Ini menunjukkan bahwa segmen Gen Z masih rentan terhadap konten yang disajikan seolah-olah “berita asli” padahal telah dimanipulasi, terutama bila tidak disertai sumber yang dapat diverifikasi. Kemampuan untuk mengecek kredibilitas sumber masih perlu terus diasah. Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa literasi digital kalangan Gen Z cukup kuat dalam hal deteksi hoaks ekstrem, tetapi masih ada ruang untuk memperkuat keterampilan verifikasi sumber dan pemahaman konteks informasi kompleks seperti isu hukum atau politik.

Video 9



Gambar 9. Persoalan Legalitas Ijazah Presiden

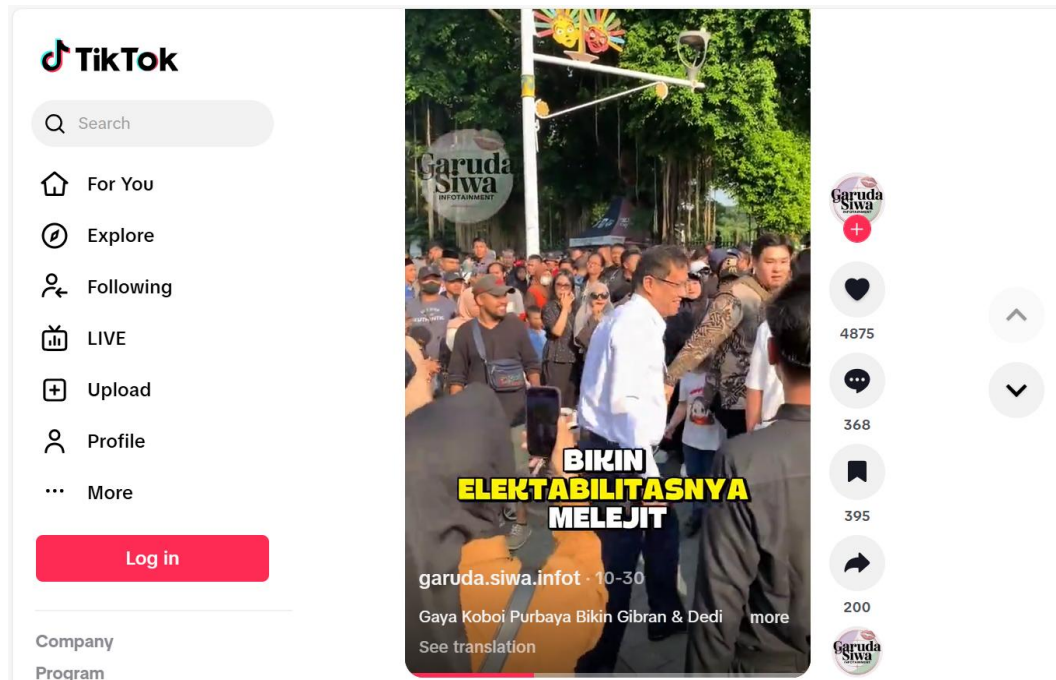
Video kesembilan mengangkat kembali isu gugatan terkait keaslian ijazah Joko Widodo dengan tuntutan materiil yang sangat besar. Berdasarkan hasil pengujian, 30 responden mengklasifikasikan informasi tersebut ke dalam kategori hoaks. Sementara itu, 5 responden menyatakan fakta dan 2 responden tidak memberikan tanggapan pasti, yang merefleksikan daya kritis audiens terhadap isu-isu lama yang bersifat kontroversial.

Isu soal keaslian ijazah Joko Widodo (Jokowi) memang beredar luas dalam beberapa tahun terakhir, tetapi klaim bahwa ijazahnya palsu telah dibantah secara kuat oleh lembaga resmi. Penyelidikan kepolisian dan pemeriksaan forensik resmi mengonfirmasi bahwa ijazah Jokowi adalah asli. Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri melakukan pemeriksaan terhadap ijazah Jokowi, membandingkannya dengan dokumen lain dan melalui uji materiil, dan menyatakan dokumen itu merupakan hasil produksi asli pada masa yang sesuai. Selain itu, Universitas Gadjah Mada (UGM) secara tegas menyatakan bahwa Joko Widodo adalah lulusan asli dari Fakultas Kehutanan UGM, lulus pada 5 November 1985. UGM juga mengklarifikasi bahwa prosedur penomoran ijazah pada masa itu berbeda dari sekarang, tetapi sah secara akademik.

Mayoritas responden berhasil mengidentifikasi narasi ini sebagai hoaks, mengindikasikan bahwa Gen Z mampu membedakan antara klaim sensasional yang berulang di media sosial dan klaim yang telah dibantah oleh sumber resmi. Ini menunjukkan kemampuan dasar untuk menolak narasi yang dipenuhi kontroversi tanpa bukti kuat. Namun, beberapa responden (5 orang) masih menganggap isu tersebut sebagai fakta. Hal ini bisa menunjukkan bahwa sebagian Gen Z mungkin kurang teliti dalam mengecek sumber berita atau kurang memahami perbedaan antara gugatan yang sedang berlangsung dengan kesimpulan faktual tentang keaslian dokumen. Terdapat kemungkinan bahwa mereka menafsirkan keberadaan gugatan sebagai indikasi bahwa tuduhan itu benar tanpa verifikasi lebih lanjut.

Isu ini bersifat kompleks karena melibatkan dinamika media sosial, klaim individual yang dipublikasikan secara luas, dan klarifikasi dari institusi resmi seperti universitas dan kepolisian. Kemampuan literasi digital yang lebih baik akan membantu Gen Z untuk memverifikasi sumber berita utama versus konten yang disebarluaskan bebas, memahami proses hukum dan konteks akademik, dan membedakan antara “isu sedang dibahas” dan “isu yang terbukti benar”. Respons mayoritas menunjukkan kesadaran kritis yang relatif tinggi terhadap narasi kontroversial berulang, tetapi masih muncul sejumlah jawaban yang kurang akurat atau ragu. Ini menunjukkan kebutuhan untuk memperkuat pendidikan media dan informasi, keterampilan konfirmasi fakta (fact-checking) dengan sumber primer, serta pemahaman kontekstual tentang dinamika hukum dan politik.

Video 10



Gambar 10. Analisis Popularitas dan Sentimen Partai Politik

Pada video terakhir, narasi yang dibangun berfokus pada pengaruh kehadiran Purbaya Yudhi Sadewa terhadap konstelasi politik KDM dan Gibran Rakabuming Raka. Persepsi partisipan terhadap isu ini terfragmentasi: 20 responden meyakini kebenarannya sebagai fakta, 14 responden menyatakannya sebagai hoaks, dan 3 responden memilih untuk tidak berkomentar. Hal ini menunjukkan bahwa konten yang bersifat analisis spekulatif politik memiliki tingkat ambiguitas yang tinggi di mata publik.

Di dunia nyata terdapat beberapa dinamika yang berkaitan dengan figur Purbaya Yudhi Sadewa dan Gibran Rakabuming Raka, namun penting dipahami bahwa narasi tentang “pengaruh Purbaya terhadap konstelasi politik KDM dan Gibran secara langsung” sering kali lebih bersifat spekulatif daripada fakta yang konkrit. Terdapat laporan survei yang menunjukkan bahwa elektabilitas Purbaya Yudhi Sadewa meningkat tajam, bahkan berada di atas beberapa tokoh lain termasuk Gibran Rakabuming Raka dalam survei terkait calon presiden dan calon wakil presiden 2029. Dalam hasil survei tersebut, elektabilitas Purbaya berada di 22,50 % (setelah Prabowo), sementara Gibran tercatat di angka 4,80 % dalam survei yang sama. Namun, menurut Antara News, sekalipun elektabilitas Purbaya meningkat, ia secara tegas menyatakan dirinya tidak tertarik terjun ke politik praktis atau menjadi kader partai politik, meskipun fenomena elektabilitas ini menarik perhatian banyak pihak.

Sebagian besar responden yang menyatakan bahwa konten itu benar atau hoaks mencerminkan kemampuan Gen Z untuk menilai apakah sebuah narasi

politik tampak realistis berdasarkan akal sehat, sumber media massa, atau pengetahuan umum mereka tentang sistem politik. Namun, adanya perbedaan opini yang cukup besar (20 vs 14) menunjukkan bahwa konten spekulatif politik menimbulkan ambiguitas yang tinggi bagi banyak orang, terutama bila narasinya mencampurkan data nyata (misalnya survei) dengan interpretasi politik yang tidak jelas sumbernya.

Perbedaan opini ini menunjukkan adanya tantangan dalam memverifikasi klaim politik yang tidak langsung. Narasi politik sering kali mengandung opini atau perkiraan, bukan fakta yang benar-benar dapat diverifikasi, dan menggunakan data yang benar, tapi menghubungkannya dengan kesimpulan besar yang belum terbukti. Ini membuat sebagian Gen Z sulit menilai validitasnya tanpa akses ke sumber berita langsung, pemahaman tentang metodologi survei, atau konteks lebih dalam tentang hubungan politik antartokoh. Respons yang terfragmentasi ini menunjukkan bahwa Gen Z cenderung menyaring informasi berdasarkan apa yang sudah mereka ketahui atau percaya secara intuitif, dan kurang yakin ketika narasi bersifat interpretatif, atau tidak sepenuhnya berdasar pada bukti kuat dari sumber yang kredibel.

Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa literasi digital dan kecerdasan emosional merupakan fondasi utama dalam menghadapi tantangan hoaks politik di era Society 5.0. Mahasiswa yang memiliki kedua kompetensi tersebut lebih siap menjadi inovator muda yang kritis, berintegritas, dan mampu berkontribusi dalam membangun ekosistem informasi yang sehat. Dengan demikian, penguatan literasi digital dan kecerdasan emosional perlu menjadi prioritas dalam pendidikan tinggi untuk melahirkan generasi inovatif yang tangguh menghadapi era digital.

Berdasarkan hasil responden dan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa mayoritas generasi Z sudah mampu menilai konten tersebut hoaks atau fakta dengan hasil analisis mereka yang menangkap hal-hal yang berlebihan yang ada di dalam konten tersebut seperti data-data berupa angka atau pernyataan yang berkonteks hiperbola.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Mahasaraswati Denpasar yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas dalam pelaksanaan penelitian ini serta dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan arahan, bimbingan, serta masukan berharga sehingga penelitian ini dapat berjalan sesuai tujuan, demikian juga kepada responden para mahasiswa semester 1 jurusan Sastra Inggris Fakultas Bahasa Asing UNMAS Denpasar yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menonton video TikTok

bertema politik dan memberikan jawaban serta alasan yang menjadi data penting dalam penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Adnan, M. & Radison, S.K. (2024). *Pengaruh Berita Hoaks di Aplikasi TikTok terhadap Persepsi Mahasiswa FISIP UNDIP Angkatan 2022 pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024*. Universitas Diponegoro.
- Antara News. (2025, Oktober 15). *Menkeu Purbaya menanggapi kritik Komisi XI DPR RI*. ANTARA News. <https://www.antaranews.com/berita/5176337/menkeu-purbaya-menanggapi-kritik-komisi-xi-dpr-ri>
- Antara News. (2025, Oktober 29). *Tanggapi elektabilitas tinggi, Purbaya: Saya tidak tertarik politik*. ANTARA News. <https://www.antaranews.com/berita/5207365/tanggapi-elektabilitas-tinggi-purbaya-saya-tidak-tertarik-politik>
- Antara News. (2025, December 16). *DPR RI perkuat literasi digital di Lombok Tengah*. Antara News. <https://www.antaranews.com/berita/5307343/dpr-ri-perkuat-literasi-digital-di-lombok-tengah>
- Asia-Pacific Solidarity Network. (2025, October 29). *Survey: Minister Purbaya leads in electability over VP Gibran and Governor Dedi Mulyadi*. Asia-Pacific Solidarity Network. <https://www.asia-pacific-solidarity.net/news/2025-10-29/survey-minister-purbaya-leads-electability-over-vp-gibran-and-governor-dedi-mulyadi.html>
- detikJabar. (2025, September 2024). *Nadiem Makarim lawan status tersangka korupsi Chromebook Rp 1,98 triliun*. detik.com. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-8127280/nadiem-makarim-lawan-status-tersangka-korupsi-chromebook-rp-1-98-triliun>
- Fauzi, & Marhamah. (2021). *Pengaruh Literasi Digital Terhadap Pencegahan Informasi Hoaks pada Remaja di SMAN 7 Kota Lhokseumawe*. Jurnal Pekommas, 6(2).
- Febriana, F. (2024). *Pengaruh Literasi Digital dan Kecerdasan Emosional terhadap Motivasi Belajar Siswa Kelas 5 MI Pembangunan Jakarta*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Hidayatullah, M. R. (2025, Agustus 15). *Pidato kenegaraan, Prabowo janji berantas tambang ilegal rugikan negara Rp300 triliun*. Bisnis.com. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20250815/44/1902645/pidato-kenegaraan-prabowo-janji-berantas-tambang-ilegal-rugikan-negara-rp300-triliun>
- Husnah, A. (2024). *Pengaruh Kecerdasan Emosional, Efikasi Diri dan Literasi Digital terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa*. Universitas Pendidikan Indonesia Repository.
- Indonesian National Police (INP). (2025, May 23). *INP confirm authenticity of former President Jokowi's university diploma*. INP – Indonesian National Police. <https://inp.polri.go.id/artikel/inp-confirm-authenticity-of-former-president-jokowis-university-diploma>
- Indraini, A. (2025, Agustus 15). *Prabowo ungkap 1.063 tambang ilegal rugikan negara Rp 300 triliun*. DetikFinance. <https://finance.detik.com/energi/d-8062247/prabowo-ungkap-1-063-tambang-ilegal-rugikan-negara-rp-300-triliun>

- Kominfo. (2021, Juni 28). *[Hoaks: BEM UI menuntut pencopotan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan]*. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. <https://kominfo.go.id>
- Kompasiana. (2025, December 10). *Menangkal Hoaks di Era Digital: Memperkuat Literasi Konstitusi Pada Generasi Z*. Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/niputuekiindriani3531/69398bbeed64156be269c4d4/menangkal-hoaks-di-era-digital-menguatkan-literasi-konstitusi-pada-generasi-z>
- Kumparan. (2025, September 13). *Gen Z dan Tantangan Demokrasi Digital*. Kumparan. <https://kumparan.com/jacika-pifi/gen-z-dan-tantangan-demokrasi-digital-25q7cnjl5Fi>
- Lestari, A.C., Mahira, A., Aini, A.K.L., Martini, C., Karin, N., & Abdillah, R. (2025). *Literasi Digital sebagai Upaya Mencegah Penyebaran Hoax*. Humanitis: Jurnal Humaniora, Sosial dan Bisnis, 3(1).
- Potenciando, M.R.M., Cabalquinto, R.D., Duliguez, E., & Labarca, R.J. (2024). *Emotional Intelligence and Fake News Quotient of BPE Students*. European Journal of Physical Education and Sport Science, 11(1).
- PPID Diskominfo Jatengprov. (2025, Agustus 4). *Isu Hoaks & Disinformasi 4 Agustus 2025 – Nadiem Makarim mengaku serahkan uang pengadaan laptop Rp450 triliun ke Jokowi (hoaks)*. PPID Diskominfo Jawa Tengah <https://ppid.diskominfo.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2025/08/04-Agustus-2025-Isu-Hoaks-Harian-Sesi.pdf>
- Ramadinta, S. & Salma, A.N. (2025). *Pengaruh Literasi Digital Terhadap Perilaku Penyebaran Berita Hoax di Kalangan Gen Z Pengguna TikTok di DKI Jakarta*. eProceedings of Management, Telkom University.
- Saber Hoaks Jawa Barat. (2025, 8 Desember). *KDM ketawa lihat Abah Anis sumbang 300 triliun buat bencana Aceh & Sumatera [Klarifikasi hoaks]*. Saber Hoaks Jawa Barat. <https://saberhoaks.jabarprov.go.id/v2/klarifikasi/detail/PTN004034/KDM-KETAWA-LIHAT-ABAH-ANIS-SUMBANG-300-TRILIUN-BUAT-BENCANA-ACEH-%26-SUMATERA>
- Sugiarti, U. (2025, Februari 10). *Mayoritas generasi Z menghabiskan waktu luang dengan media sosial*. GoodStats. <https://goodstats.id/article/mayoritas-generasi-z-menghabiskan-waktu-luang-dengan-media-sosial-KT9NM>
- Sutrisna, T., & Ramadhan, A. (2025, Agustus 15). *Prabowo tahu ulah aparat di tambang ilegal: Saya senior tentara, junior jangan macam-macam*. Kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2025/08/15/14232411/prabowo-tahu-ulah-aparat-di-tambang-ilegal-saya-senior-tentara-junior-jangan>
- The Conversation. (2021). *Fake News: People with Greater Emotional Intelligence are Better at Spotting Misinformation*.
- Universitas Airlangga. (2025, July 12). *Gen Z dan Masa Depan Demokrasi: Tantangan Literasi Politik di Era Post-Truth*. Sekolah Pascasarjana UNAIR.
- Universitas Gadjah Mada (UGM). (2025, July 17). *UGM clarifies Sofian Effendi remarks on authenticity of Joko Widodo's diploma*. Universitas Gadjah Mada. <https://ugm.ac.id/en/news/ugm-clarifies-sofian-effendi-remarks-on-authenticity-of-joko-widodos-diploma/>

<https://pasca.unair.ac.id/gen-z-dan-masa-depan-demokrasi-tantangan-literasi-politik-di-era-post-truth/>